



Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi

Volume 15 Nomor 1 Tahun 2025: 27-40

<http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JIIA>

DOI: 10.33592/jiia.v15i1.7435

p-ISSN 2477-5088

e-ISSN 2716-2621

Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Diskominfo Kabupaten Lombok Tengah

Implementation of Public Information Disclosure Policy at The Communication and Information Office Central Lombok Regency

¹Hafiz Maulana; ²Muhammad Ali; ³Muhammad Aprian Jailani

^{1,2,3}Administrasi publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah
Mataram, Indonesia

Email: hafizmaulana544@gmail.com, aprianjaelani@ummat.ac.id

(Diterima: 11-05-2025; Ditelaah: 16-05-2025; Disetujui: 03-05-2025)

ABSTRAK

Proses terciptanya hubungan yang harmonis antara pemerintah dengan masyarakat tentunya dibutuhkan akses informasi yang terbuka dan mudah diakses sebagai bahan penilaian masyarakat atas kinerja dari pemerintah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada Diskominfo kabupaten Lombok Tengah. metode yang digunakan yakni metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi dengan analisis tahapan analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil yang diperoleh implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada Diskominfo Kabupaten Lombok Tengah belum sepenuhnya optimal dipengaruhi beberapa faktor diantaranya standart dan sasaran kebijakan keterbukaan informasi publik belum sepenuhnya memenuhi standart dibuktikan dengan belum diperbaharuinya data informasi terkait kinerja dan anggaran terkini pada website, sumber daya yang kurang memadai dan kompetensi yang kurang dipengaruhi oleh minimnya pelatihan dan terbatasnya anggaran yang tersedia, komunikasi antar organisasi berupa rapat resmi terkait keterbukaan informasi publik hanya dilakukan satu kali dalam setahun, Karakteristik agen pelaksana belum mempunyai komitmen yang utuh, Disposisi pelaksana adanya penerimaan yang positif atas kebijakan keterbukaan informasi publik namun terkait pemahaman pelaksana tidak ditunjang dengan adanya sosialisasi yang rutin dan yang terakhir lingkungan eksternal yakni faktor ekonomi berupa anggaran dari pemerintah yang kurang dialokasikan untuk melaksanakan kebijakan keterbukaan informasi publik.

Kata kunci: implementasi, keterbukaan informasi, diskominfo

Hafiz Maulana; Muhammad Ali; Muhammad Aprian Jailani (2025). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Diskominfo Kabupaten Lombok Tengah

ABSTRACT

The creation of a harmonious relationship between the government and the public requires open and easily accessible information as a basis for the public to assess government performance. This study aims to examine how the policy of public information disclosure is implemented at the Department of Communication and Informatics (Diskominfo) of Central Lombok Regency. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The data analysis process consists of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that the implementation of the public information disclosure policy at Diskominfo Central Lombok Regency has not been fully optimal. Several influencing factors include: the standards and targets of the public information disclosure policy have not been fully met, as evidenced by the outdated performance and budget data on the official website; insufficient resources and competencies due to limited training and budget; weak inter-organizational communication, with official meetings regarding public information disclosure held only once a year; the characteristics of the implementing agents who lack full commitment; positive acceptance of the policy (disposition), yet inadequate understanding due to the lack of regular socialization; and lastly, the external environment, particularly economic factors, where limited government budget allocation hinders the effective implementation of the public information disclosure policy.

Keywords: *implementation, information disclosure, diskominfo*

A. PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu aspek krusial dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat di era modern. Definisi keterbukaan menurut David Beetham dalam (Kapahang et al., 2020) Keterbukaan adalah penyampaian informasi faktual yang dilakukan oleh pengambil kebijakan kepada masyarakat secara jelas dan nyata, dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan bersama, seperti dalam hal menanggapi kritik, saran, dan masukan dari berbagai elemen masyarakat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam tata kelola informasi publik yang dimana keterbukaan informasi publik juga menjadi fondasi penting bagi terciptanya hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam proses terciptanya hubungan yang harmonis antara pemerintah dengan masyarakat tentunya dibutuhkan akses informasi yang terbuka dan mudah diakses sebagai bahan penilaian masyarakat atas kinerja dari pemerintah. Keterbukaan informasi publik telah diatur melalui Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengamanatkan badan publik untuk menyediakan informasi secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Dengan adanya aturan yang mengatur tentang keterbukaan informasi yaitu Undang-Undang No. 14 tahun 2008 diharapkan memiliki manfaat yang signifikan terhadap masyarakat jika diimplementasikan dengan baik, Manfaat keterbukaan informasi publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat di era digital saat ini sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan kemudahan akses informasi melalui platform digital, masyarakat dapat dengan cepat mendapatkan data yang relevan terkait kebijakan publik dan layanan pemerintah.

Hafiz Maulana; Muhammad Ali; Muhammad Aprian Jailani (2025). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Diskominfo Kabupaten Lombok Tengah

Pada era digital saat ini, keterbukaan informasi publik tidak hanya mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kualitas hidup secara menyeluruh. Keterbukaan ini memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam memahami proses penyusunan kebijakan publik, program-program yang akan dijalankan, mekanisme pengambilan keputusan, hingga alasan di balik keputusan tersebut. Melalui transparansi informasi, masyarakat dapat lebih aktif berperan dalam mengawasi serta terlibat dalam proses pengambilan kebijakan, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dan responsif terhadap kebutuhan publik (Zahlul, 2020).

Kebijakan Keterbukaan informasi publik memiliki standart yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yakni diantaranya: 1. Transparansi dan akuntabilitas merupakan standar utama dalam UU KIP. Undang-undang ini menegaskan bahwa badan publik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan terbuka kemudian dapat diakses oleh masyarakat. 2. Kemudahan akses dan ketepatan waktu berdasarkan UU KIP menekankan bahwa informasi publik harus mudah diakses oleh masyarakat. 3. Partisipasi aktif masyarakat dilihat dari sosialisasi yang dilakukan untuk mengedukasi masyarakat mengenai keterbukaan informasi, sehingga masyarakat memahami hak mereka.

Instansi badan publik yang memiliki tugas dan fungsi mengelola informasi dan dokumentasi didaerah adalah Diskominfo adalah instansi yang memiliki ruang lingkup kinerja mengelola informasi dan dokumentasi didaerah yang memiliki peranan penting dalam mengintegrasikan setiap informasi dari OPD yang ada kedalam satu platfom berupa website yang memberikan kemudahan Masyarakat dalam mengaksesnya.

Penelitian terdahulu sebagai acuan untuk memberikan landasan teoretis dan empiris untuk membantu memberikan pemahaman bahwa isu yang dikaji relevan dan membutuhkan kajian lebih lanjut. dalam Beberapa penelitian relevan yang ada menunjukkan bahwa implementasi keterbukaan informasi publik masih menghadapi berbagai kendala dalam memenuhi standart keterbukaan informasi yang efektif bagi masyarakat seperti penelitian oleh Indah & Hariyanti, (2018) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik masih menghadapi hambatan, khususnya dalam aspek sumber daya. Salah satu permasalahan yang ditemukan adalah terbatasnya jumlah staf pada seksi pelayanan informasi publik yang berperan sebagai pelaksana kebijakan tersebut. Pada penelitian lainnya yang dilakukan oleh Ulaan et al., (2022) menunjukkan bahwa Keterbukaan informasi di Dinas Kominfo Minsel dinilai masih belum optimal. Informasi yang disampaikan kepada publik umumnya terbatas pada hal-hal yang kurang esensial, dan penyampaiannya pun tidak dilakukan secara langsung kepada masyarakat.

Diskominfo kabupaten lombok tengah terdapat ketidaksesuaian antara kebijakan yang ada dengan kondisi dilapangan. Konsistensi pelaksana kebijakan dapat dilihat melalui relevansi isi kebijakan dan implementasinya artinya Substansi permasalahan terdapat pada ketidaksesuaian antara norma dan empirisme, (Aprian Jailani & Hakim, 2019). ketidaksesuaian antara norma yang ada dan kondisi empirisme yang dialami Diskominfo Kabupaten Lombok Tengah dalam menjalankan tugasnya dalam menyebarkan informasi

yang sesuai dengan standart keterbukaan informasi publik mengalami beberapa kendala dari segi pelayanannya berdasarkan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun (2020) mengungkapkan bahwa salah satu masalah yang ditemukan adalah terbatasnya pemahaman unit kerja terhadap prinsip keterbukaan informasi dan klasifikasi data menjadi salah satu penyebab rendahnya kesadaran untuk secara konsisten menyediakan informasi yang bersifat berkala.

Diskominfo Kabupaten Lombok Tengah sebagai pejabat pengelola informasi dan dokumentasi utama didaerah tentu harus memberikan contoh bagi organisasi perangkat daerah lainnya dalam memberikan keterbukaan informasi ini. Jika mengacu pada monitoring evaluasi keterbukaan informasi publik di Provinsi NTB tahun 2024 yang dilakukan oleh komisi Informasi Provinsi NTB dalam Kualifikasi Badan Publik Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota, Lombok Tengah berada di urutan ke delapan dari sepuluh jumlah kabupaten/kota dengan nilai (87,68) dengan kategori menuju informatif dan di urutan pertama yaitu Kabupaten Sumbawa Barat dengan nilai (99,60) dengan kategori informatif dan disusul urutan kedua yaitu Kota Mataram dengan nilai (99,20) dari data ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lombok Tengah masih tertinggal dari kabupaten/kota yang ada di Provinsi NTB dan tentu masih membutuhkan optimalisasi layanan yang jauh lebih baik, (Komisi Informasi Provinsi NTB, 2024)

Berdasarkan permasalahan yang peneliti ungkapkan diatas penelitian ini penting untuk diteliti dikarenakan Keterbukaan informasi publik merupakan prinsip fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Melalui kebijakan ini, pemerintah khususnya Diskominfo Kabupaten Lombok Tengah dituntut untuk transparan, akuntabel, dan partisipatif dalam menjalankan fungsi pelayanan publik. dengan adanya keterbukaan informasi publik menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik, namun penelitian terkait keterbukaan informasi publik hanya banyak dilakukan dikota-kota besar di pulau jawa dan belum dilakukan di Kabupaten Lombok Tengah sehingga mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan fokus lokasi penelitian yang berbeda yang akan menghasilkan hasil yang berbeda dalam penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada Diskominfo Kabupaten Lombok Tengah yang akan menghasilkan manfaat teoritis memberikan sumbangsi ilmu pengetahuan dan menjadi bahan literatur dalam hal implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik dan manfaat praktis dapat menjadi faktor pendorong Diskominfo Kabupaten Lombok Tengah dalam memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, Menurut Abdussamad, (2021:30) penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang berfokus pada pengamatan terhadap fenomena atau gejala yang berlangsung secara alami. sehingga pelaksanaannya tidak dilakukan di laboratorium, melainkan langsung di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Pada Dinas Komunikasi

Dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah.

Penggunaan metode penelitian kualitatif pada penelitian ini didasarkan pada pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mampu menggali dan memahami secara mendalam fenomena implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada Diskominfo Kabupaten Lombok Tengah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi proses kebijakan secara komprehensif, termasuk bagaimana kebijakan tersebut dipahami dan diterapkan.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan informan yang relevan, yaitu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Lombok Tengah, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi (PIKP), Staff Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi lalu kemudian unsur masyarakat sebagai sasaran kebijakan yaitu Karang Taruna Kelurahan Leneng, Kec, Praya Kabupaten Lombok Tengah. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mendalam terkait implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Diskominfo Kabupaten Lombok Tengah. Data sekunder dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumen yaitu peraturan perundang-undangan dan melalui literatur lain yang mendukung seperti jurnal. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi dengan teknik analisis data pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan dari Van Matern dan Van Horn yang terdiri dari 6 Variabel yakni standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, disposisi pelaksana dan lingkungan eksternal. Berdasarkan hasil observasi di lapangan maka teori ini cocok untuk digunakan dalam mengkaji bagaimana implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah. Teori Van Meter dan Van Horn menawarkan pendekatan yang sistematis dalam menganalisis implementasi kebijakan. Teori ini membantu mengidentifikasi apakah kebijakan berhasil diimplementasikan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan atau tidak. Penggunaan teori ini relevan dalam melihat implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada diskominfo kabupaten Lombok Tengah, dimana variabel standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, dan komitmen pelaksana sangat menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Teori Van Meter dan Van Horn juga memperhitungkan pengaruh faktor eksternal, seperti lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

Standart dan Sasaran Kebijakan

Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa untuk menilai dan meningkatkan peluang keberhasilan suatu kebijakan, penting untuk memastikan bahwa standar dan tujuan kebijakan tersebut sejalan dengan fungsi serta hasil yang diharapkan. (Viranda et al., 2024). Standar kebijakan merujuk pada ketentuan, aturan, atau pedoman yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kebijakan, sedangkan sasaran kebijakan mengacu pada tujuan yang ingin dicapai serta kelompok yang menjadi target kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil

wawancara dengan Bapak Iswandi khairy Ramen, S.IP., M.Han selaku Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) menjelaskan bahwa: “sejauh ini kita memberikan transparansi informasi dengan menyediakan *website* untuk mengakses informasi terkait kinerja.

Sedangkan sasaran kebijakan adalah tercapainya keterbukaan informasi yang transparan dengan menyediakan informasi yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai fungsi pengawasan, target dari kebijakan dituju kepada masyarakat umum terkhusus masyarakat Lombok Tengah”.(Wawancara Jum’at 7, Februari 2025). Berdasarkan uraian narasumber di atas menjelaskan bahwa Diskominfo telah memberikan transparansi informasi dengan menyediakan *website* untuk mengakses informasi terkait kinerja. sedangkan sasaran kebijakan adalah tercapainya keterbukaan informasi yang transparan dengan menyediakan informasi yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Tercapainya target sasaran kebijakan keterbukaan informasi publik dinilai dari ketersediaan informasi yang disediakan, berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 pasal 14 adalah diantaranya:

1. Informasi secara berkala
 - b) Ringkasan informasi tentang program atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup badan publik.
 - c) Informasi tentang laporan kinerja.
 - d) Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit.

2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 pasal 19 badan publik wajib mengumumkan secara serta merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak, informasi yang dimaksud diantaranya:

- a) Informasi bencana alam
 - b) Informasi terkait keadaan darurat yang mengancam keselamatan masyarakat.
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 pasal 21 badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang meliputi:

- a) Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan Badan Publik
- b) Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan
- c) Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga
- d) Data perbendaharaan atau inventaris
- e) Rencana strategis dan rencana kerja badan publik

Untuk mengukur capaian sasaran kebijakan keterbukaan informasi publik pada Diskominfo Kabupaten Lombok tengah berikut adalah jenis informasi yang disediakan pada *website* yang digunakan dalam menyebarkan informasi publik oleh Diskominfo Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024:

Gambar 1
Daftar Informasi Secara Serta Merta Diskominfo Lombok Tengah 2024

DAFTAR INFORMASI SERTA MERTA

[Login](#)

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2024 [Filter](#) [Clear](#)

Show **All** Rows Search

No	Ringkasan Isi Informasi	Penanggungjawab pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Tahun	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip	Detail
65	Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Diskominfo Kab. Lombok Tengah TA. 2024	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Praya, 18 Januari 2024	2024	online	10 Tahun	Lihat

Showing 1 to 1 of 1 entries

Sumber: <https://ppid.lomboktengahkab.go.id/>, Maret, 2025

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa informasi yang ditampilkan hanya terdapat dokumen pelaksanaan anggaran yang bukan termasuk spesifikasi informasi serta merta. Maka peneliti menyimpulkan bahwa informasi serta merta tidak tersedia.

Gambar 2
Daftar Informasi Secara Berkala Diskominfo Lombok Tengah 2024

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2024 [Filter](#) [Clear](#)

Show **All** Rows Search

No	Ringkasan Isi Informasi	Penanggungjawab pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Tahun	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip	Detail
475	Peraturan Bupati tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 2022	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Praya, 28 Juni 2024	2024	online	2 Tahun	Lihat
484	LHKPN Sekdis Kominfo	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Praya, 20 Juni 2024	2024	online	-	Lihat
524	Inventaris Dinas Komunikasi dan Informatika 2024	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Praya, 6 Juni 2024	2024	online	2 Tahun	Lihat
584	Perjanjian Kinerja 2024 Kominfo Loteng	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Praya, 24 April 2024	2024	online	-	Lihat

585	Ringkasan DPA 2024 Kominfo Loteng	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Praya, 24 April 2024	2024	online	-	Lihat
588	Laporan Keuangan 2023 Kominfo	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Praya, 23 April 2024	2024	online	-	Lihat
589	LHKPN Kadis Kominfo 2023	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Praya, 23 April 2024	2024	online	-	Lihat
590	Laporan Kinerja (LKJIP) Kominfo 2023	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Praya, 23 April 2024	2024	online	-	Lihat
666	SK PPID DISKOMINFO TAHUN 2024	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Praya, 7 Februari 2024	2024	online	2 Tahun	Lihat

Sumber: <https://ppid.lomboktengahkab.go.id/>, Maret 2025

Berdasarkan data di atas dalam kategori informasi secara berkala menunjukkan bahwa informasi terkait laporan kinerja dan laporan keuangan Diskominfo Kabupaten Lombok Tengah belum dapat diakses pada tahun yang terbaru yakni pada tahun 2024, data laporan kinerja dan laporan keuangan yang dapat diakses hanya tahun 2023 yang artinya dokumen yang terpublikasi pada website resmi dikelola belum diperbaharui. Kemudian jenis informasi yang terakhir adalah jenis informasi setiap saat, berdasarkan Observasi yang dilakukan oleh peneliti pada website yang disediakan tidak ditemukan jenis informasi setiap saat yang terpublikasi pada tahun 2024 dan 2025 oleh Diskominfo Kabupaten Lombok Tengah.

Selanjutnya Bapak Drs. H. Muhamad menjelaskan terkait bagaimana upaya Diskominfo dalam memenuhi standar keterbukaan informasi publik dan apa sasaran kebijakan apakah sudah memenuhi target. Berikut penjelasannya: “Menurut saya kita sudah memenuhi standar menurut Undang-undang yang berlaku seperti halnya transparansi informasi dengan upaya kita menyebarkan informasi mengenai kinerja pemerintah melalui website maupun media sosial Tiktok, Youtube dan Instagram yang mudah diakses”. (Wawancara Kamis, 13 Februari 2025).

Untuk mengukur sejauh mana upaya yang dilakukan Diskominfo Kabupaten Lombok Tengah sebagai PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) utama di daerah dalam memenuhi standar dan sasaran kebijakan keterbukaan informasi publik dapat diukur berdasarkan data laporan evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara barat (NTB) pada tahun 2024 terkait Indeks Keterbukaan Informasi Publik. berikut adalah indeks keterbukaan informasi publik di setiap kabupaten/kota di Provinsi NTB:

Tabel 1
Daftar Indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi NTB Tahun 2024

NO	BADAN PUBLIK	NILAI	KATEGORI
1	KABUPATEN SUMBAWA BARAT	99.60	INFORMATIF
2	KOTA MATARAM	99.20	INFORMATIF
3	KABUPATEN LOMBOK TIMUR	97.84	INFORMATIF

4	KABUPATEN SUMBAWA	97.08	INFORMATIF
5	KABUPATEN LOMBOK UTARA	97.00	INFORMATIF
6	KABUPATEN LOMBOK BARAT	93.76	INFORMATIF
7	KABUPATEN DOMPU	92.20	INFORMATIF
8	KABUPATEN LOMBOK TENGAH	87.68	MENUJU INFORMATIF
9	KOTA BIMA	75.76	CUKUP INFORMATIF
10	KABUPATEN BIMA	0	TIDAK INFORMATIF

Sumber: <https://komisi.informasi.ntbprov.go.id>, Maret 2025

Berdasarkan data tabel diatas menunjukkan bahwa Indeks keterbukaan informasi publik pada kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2024 yaitu 87.68 dengan kategori menuju informatif yakni kategori badan publik sudah berada di jalur yang baik dalam menerapkan keterbukaan informasi, tapi masih perlu peningkatan. Namun jika dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi NTB Kabupaten Lombok Tengah masih tertinggal dibanding Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Mataram dengan kategori informatif.

Diskominfo Kabupaten Lombok Tengah memanfaatkan *website* sebagai wadah dalam memberikan keterbukaan informasi kepada publik berikut adalah daftar *website* yang dikelola:

Tabel 2
Daftar Website Utama Yang Dikelola Diskominfo Lombok Tengah

No.	Nama Website	Link Akses	Keterangan
1	Satu Data Lombok Tengah	https://satudata.lomboktengahkab.go.id	Portal data seluruh OPD yang terintegrasi berisikan data sektoral berbentuk grafik dan tabel.
2	PPID Lombok Tengah	https://ppid.lomboktengahkab.go.id	Untuk Mengakses Informasi Publik yang ada di Daerah
3	SP4N Lapor Lombok Tengah	https://www.lapor.go.id	Untuk menyampaikan Pengaduan kepada Pemerintah
4	Diskominfo Lombok Tengah	https://diskominfo.lomboktengahkab.go.id	Berisikan Publikas kegiatan dan program Diskominfo dan Menjadi saluran komunikasi antara pemerintah dan masyarakat
5	Pemkab Lombok Tengah	https://lomboktengahkab.go.id/	Portal resmi pemerintahan daerah berisikan Informasi umum terkait pemerintahan

Sumber: Diskominfo Kabupaten Lombok Tengah

Berdasarkan tabel diatas terdapat 5 *website* utama yang dikelola Diskominfo Kabupaten Lombok Tengah dalam memenuhi standar dan sasaran keterbukaan informasi publik, dimana melalui *website* tersebut masyarakat Kabupaten Lombok Tengah dapat mengakses informasi seputar program, kinerja, kebijakan dan anggaran pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

Dari penjelasan mengenai langkah yang dilakukan Diskominfo Kabupaten Lombok Tengah dalam memenuhi standar keterbukaan informasi publik Karang Taruna Kelurahan Hafiz Maulana; Muhammad Ali; Muhammad Aprian Jailani (2025). *Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Diskominfo Kabupaten Lombok Tengah*

Leneng, Kec. Praya Kab. Loteng selaku unsur masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan berpendapat bahwa: “Bagi saya selaku masyarakat umum ketersediaan informasi melalui berbagai *website* yang disediakan tidak jelas pembagian fungsi masing-masing *website* tersebut sehingga banyak masyarakat kebingungan ingin mengakses informasi yang dibutuhkan melalui *website* yang mana”. (Wawancara Rabu, 26 Maret 2025).

Pendapat kedua dari Karang Taruna Kelurahan Leneng, Kec. Praya Kab. Loteng selaku unsur masyarakat menjelaskan bahwa: “Informasi terkait laporan kinerja yang disebarkan belum sepenuhnya diperbaharui cara mengaksesnya juga ribet untuk masyarakat awam”. (Wawancara Rabu, 26 Maret 2025).

Pendapat ketiga dari Karang Taruna Kelurahan Leneng, Kec. Praya Kab. Loteng selaku unsur masyarakat menjelaskan bahwa: “Informasi terkait program kerja dan hasil kinerja sebaiknya tidak hanya dipublikasikan pada *website* tapi melalui sosial media yang banyak diakses oleh masyarakat juga seperti instagram dan tiktok kemudian diringkas dengan bahasa yang mudah dipahami agar Masyarakat mudah mengevaluasi kinerjanya” (Wawancara Rabu, 26 Maret 2025). Berdasarkan uraian narasumber di atas menyatakan bahwa informasi yang disebarkan melalui *website* kurang lengkap terkait program kerja dan hasil kinerja dan masih banyak masyarakat yang minim pemahaman terkait cara mengakses *website* yang disediakan tersebut.

Sumber daya

Sumber daya meliputi sumber daya manusia dan keuangan tentunya pelaksanaan kebijakan terhambat akibat kekurangan dana untuk mendukung program yang direncanakan (Forwanti & Setiawan, 2022). Sumber daya dalam Implementasi kebijakan keterbukaan informasi Publik pada Diskominfo Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Drs. H. Muhamad selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika menjelaskan bahwa: “SDM yang dimiliki saat ini sebenarnya masih kurang karena dulu bidang APTIKA dan PIKP ini pecah sehingga jumlah kita masih kurang, lalu dari sisi kemampuan juga ada yang baru masuk, ada yang P3K juga masih belajar sehingga SDM kita disini masih kurang dan perlu adanya penambahan dan peningkatan kapasitas, kemudian dari sisi anggaran sebenarnya kita masih banyak yang ingin dilakukan termasuk membuat *podcast* agar bisa menginformasikan informasi setiap saat mengenai program dan kegiatan yang dilakukan karna kalau lewat *website* kebanyakan masyarakat tidak bisa paham cara mengaksesnya, namun masih terhalang anggaran yang terbatas” (Wawancara Kamis, 13 Februari 2025). Berikut adalah daftar jumlah pegawai yang dimiliki Diskominfo Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan pendidikan terakhirnya, diantaranya yaitu:

Tabel 3
Daftar Tingkat Pendidikan Diskominfo Kab.Loteng

No	Uraian	S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	Jumlah
1.	Kepala Dinas			1			-	1
2.	Sekretaris		1				-	1
3.	Kepala Bidang		1	2			-	3
4.	Kasubbag/Kepala Seksi		1	1			-	2
5.	Staf			13	6	3	-	22
	Jumlah		3	17	6	3	-	29

Sumber : Diskominfo Lombok Tengah, 2024

Berdasarkan tabel di atas terdapat 29 jumlah pegawai yang dimana tingkat pendidikan terbanyak adalah lulusan S1 yaitu 17 pegawai diikuti dengan lulusan D3 sebanyak 6 orang dan yang terakhir lulusan S2 dan SLTA yakni sebanyak 3 orang. Kemudian terkait kompetensi pegawai Diskominfo mengadakan bimbingan teknis dalam rangka pengembangan kapasitas pelaksana dalam mengelola pengaduan dari masyarakat melalui website SP4N Lapor namun hanya dilakukan satu kali di tahun 2024 masih terdapat *website* dan sosial media lainnya yang belum dilakukan bimbingan teknis agar penggunaannya dalam menyebarkan informasi mengenai kegiatan, kinerja dan kebijakan pemerintah diterapkan lebih optimal.

Komunikasi Antar Organisasi

Van Meter dan Van Horn menekankan pentingnya komunikasi antar organisasi. Apabila komunikasi ini tidak efektif, maka pelaksanaan kebijakan yang dirancang untuk mengatasi masalah akan terhambat dan berdampak pada hasil yang dicapai. Diskominfo Kabupaten Lombok Tengah dalam mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi publik melibatkan seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) pada Kabupaten Lombok Tengah dengan jumlah 34 OPD. Komunikasi Diskominfo Lombok Tengah dengan organisasi lainnya dalam menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik adalah dengan mengadakan koordinasi berupa rapat penguatan kelembagaan pada PPID disetiap OPD Rapat koordinasi dengan setiap PPID pada OPD di Kabupaten Lombok Tengah dilakukan oleh Diskominfo Kabupaten Lombok Tengah sebagai PPID utama yang mengelola informasi dan dokumentasi di daerah. Rapat tersebut dilakukan untuk penguatan kelembagaan pada PPID disetiap OPD dalam mendorong keterbukaan informasi publik di Kabupaten Lombok Tengah. Namun rapat terkait keterbukaan informasi publik hanya dilakukan satu kali dalam satu tahun yang dipengaruhi oleh komunikasi lebih banyak dilakukan secara *online*.

Karakteristik Agen pelaksana

Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa kinerja implementasi kebijakan oleh organisasi pelaksana sangat dipengaruhi oleh karakteristik yang sesuai dan cocok dengan para agen pelaksanaannya. Artinya, segala hal yang terkait dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan harus dipertimbangkan. Para pelaksana kebijakan diharapkan untuk lebih disiplin dan ketat dalam menjalankan proses implementasi kebijakan (Forwanti & Setiawan, 2022).

Karakteristika agen pelaksana pada Diskominfo Kabupaten Lombok Tengah dalam mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi publik dapat diukur dengan adanya survey kepuasan masyarakat terkait karakteristik agen pelaksana dalam mengelola informasi dan dokumentasi yang mendorong keterbukaan informasi publik. Berdasarkan observasi peneliti terhadap *website* yang dikelola tidak tersedianya data yang dapat diakses terkait survey kepuasan masyarakat tersebut maka karakteristik agen pelaksana tersebut tidak dapat diukur dengan objektif. Penulis menyimpulkan bahwa pelaksana kebijakan pada Diskominfo Kabupaten Lombok Tengah belum mempunyai komitmen yang utuh dalam memenuhi karakteristik yang disiplin dan berkomitmen dalam pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik hal ini dikarenakan tidak adanya survey khusus atau penyebaran kuesioner terkait dengan kepuasan masyarakat atas karakteristik dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Disposisi Pelaksana

Disposisi atau sikap para pelaksana sangat berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana dapat memengaruhi jalannya kebijakan. Hal ini terjadi karena kebijakan yang diterapkan sering kali bukan hasil dari formulasi warga setempat yang lebih memahami masalah dan kebutuhan mereka. Kebijakan publik cenderung bersifat *top-down*, di mana keputusan diambil dari atas ke bawah, yang membuat pengambil keputusan mungkin tidak mengetahui atau bahkan tidak dapat menyentuh kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang seharusnya diselesaikan. (Marlina et al., 2021).

Terkait dengan disposisi pelaksana pada kebijakan keterbukaan informasi publik di Diskominfo Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iswandi Khairy Ramen, S.IP., M.Han selaku Kepala Bidang PIKP menjelaskan bahwa: "Kami tidak pernah ada penolakan terhadap kebijakan keterbukaan informasi ini seluruh pelaksana memiliki sikap yang mendukung penerapannya bisa dilihat dari komitmen kita dalam mengelola dan menyebarkan informasi terkait kegiatan pemerintah melalui media yang ada" (Wawancara Senin, 10 Februari 2025).

Disposisi pelaksana dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Diskominfo Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan adanya penerimaan yang positif dari para implementator. Kemudian Untuk meningkatkan pemahaman pelaksana kebijakan, Diskominfo Lombok Tengah telah mengambil langkah strategis dengan mengikuti rapat penguatan kelembagaan yang diikuti oleh setiap OPD di Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2024 terkait dengan kebijakan keterbukaan informasi publik agar pelaksana memiliki pemahaman terkait kebijakan tersebut. Namun kegiatan rapat dalam menunjang pemahaman pelaksana tersebut hanya dilakukan satu kali dalam setahun.

Lingkungan Eksternal

Faktor terakhir yang perlu diperhatikan dalam menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal mendukung keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah yang menghambat kinerja implementasi kebijakan (Dalili, 2023). Kondisi Sosial Dalam konteks keterbukaan informasi publik, masyarakat yang memiliki tingkat literasi informasi

dan kesadaran yang tinggi akan kebijakan publik cenderung lebih aktif dalam melakukan pengaduan dan mengawasi kinerja pemerintah. Kondisi sosial pada diskominfo ka.loteng berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) menjelaskan bahwa: "Sejauh ini tidak ada tekanan dari masyarakat terkait dorongan dalam memberikan keterbukaan informasi publik pada Diskominfo, rata-rata pengaduan ditujukan kepada dinas lain melalui *website* Diskominfo yang kemudian laporan tersebut kami informasikan ke instansi terkait" (Wawancara Senin, 10 Februari 2025).

Berdasarkan uraian narasumber di atas menyatakan bahwa sejauh ini tidak ada tekanan dari masyarakat terkait dorongan dalam memberikan keterbukaan informasi publik di Diskominfo Lombok Tengah. Rata-rata pengaduan ditujukan kepada dinas lain melalui *website* diskominfo. Lalu kondisi ekonomi tentunya berkaitan dengan anggaran yang dialokasikan berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kominfo menjelaskan bahwa: "Anggaran yang dialokasikan dalam memberikan pelayanan mengelola dan memberikan informasi publik kurang. Pemerintah tentu punya skala prioritas untuk melebihi dahulukan program lainnya," (Wawancara 13 februari 2025) Berdasarkan uraian narasumber tersebut menyatakan bahwa anggaran yang dialokasikan dalam memberikan pelayanan mengelola dan memberikan informasi publik kurang. Pemerintah tentu punya skala prioritas untuk melebihdahulukan program lainnya.

Terakhir terkait kondisi politik Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Lombok Tengah juga menjelaskan bahwa: "Pemerintah daerah mempunyai komitmen terhadap kebijakan tersebut bisa dilihat beberapa langkah seperti menyediakan anggaran untuk memberikan informasi kepada masyarakat walaupun minimnya anggaran berpengaruh terhadap efektifitas penerapan kebijakan namun kita berusaha untuk memaksimalkannya" (Wawancara 13 februari 2025). Jadi dari kondisi sosial ekonomi dan politik hanya kondisi ekonomi yang berpengaruh signifikan terhadap penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik pada Diskominfo Kabupaten Lombok tengah.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan hasil dan pembahasan diatas yang di analisis Berdasarkan 6 Variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan dari Van matern dan Horn yakni standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, disposisi pelaksana dan faktor eksternal. Maka peneliti menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada Diskominfo Kabupaten Lombok Tengah belum sepenuhnya optimal dipengaruhi beberapa faktor diantaranya yakni standar dan sasaran kebijakan keterbukaan informasi publik belum sepenuhnya memenuhi standar dibuktikan dengan belum diperbaharuinya data informasi terkait kinerja dan anggaran terkini pada *website*.

Sumber daya yang kurang memadai dan kompetensi yang kurang dipengaruhi oleh minimnya pelatihan dan terbatasnya anggaran yang tersedia dalam menerapkan kebijakan. Komunikasi antar organisasi yakni koordinasi antar OPD berupa rapat resmi terkait keterbukaan informasi publik hanya dilakukan satu kali dalam setahun. Karakteristik agen pelaksana belum mempunyai komitmen yang utuh dikarenakan tidak terdapat survey

kepuasan masyarakat yang digunakan sebagai indikator. Disposisi pelaksana adanya penerimaan yang positif atas kebijakan keterbukaan informasi publik namun terkait pemahaman pelaksana tidak ditunjang dengan adanya sosialisasi yang rutin dan yang terakhir Lingkungan eksternal yakni faktor ekonomi berupa anggaran dari pemerintah yang kurang dialokasikan untuk melaksanakan kebijakan keterbukaan informasi publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). Metode penelitian Kualitatif (P. Rapanna (ed.)). CV. syakir Media Press.
- Aprian Jailani, M., & Hakim, A. (2019). Policy Implementation of the Bus Rapid Transit System in Mataram City. 22(3), 180-186.
- Forwanti, E., & Setiawan, F. (2022). Implementasi Kebijakan Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya (Perda Kota Palangka Raya No. 9 Tahun 2012). Jurnal Administrasi Publik (JAP), 8(2), 88-101.
- Indah, T., & Hariyanti, P. (2018). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya. Jurnal Komunikasi, 12(2), 127-140. <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol12.iss2.art3>
- Indonesia, P. pusat. (2008). Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Kapahang, S. E., Mingkid, E., & Kalesaran. (2020). Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Kominfo Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Acta Diurna Komunikasi, 2(1), 1-13.
- Komisi Informasi Provinsi NTB. (2024). Laporan Monev keterbukaan informasi publik (pp. 1-27).
- La Samudia Dalili, Daswati Daswati, S. C. A. (2023). Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes. Jurnal Multidisiplin Indonesia, 2(2), 241-254. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i2.177>
- Marlina, E., Dawud, J., & Budiarti, A. (2021). Implementasi Kebijakan Kelas Ibu Hamil sebagai Bentuk Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Penurunan Kematian Ibu di Kota Cimahi. Jurnal Media Administrasi Terapan, 2(1), 1-9. <https://doi.org/10.31113/jmat.v2i1.5>
- Ulaan, A. L., Sambiran, S., & Kasenda, V. (2022). Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik (KIP) di Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Minahasa Selatan. Governance, 2(1), 1-9.
- Viranda, e., novaria, r., & soesiantoro, a. (2024). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah sebagai upaya penerapan sustainable development goals (sdgs) di kecamatan mulyorejo kota surabaya. Praja observer: jurnal penelitian administrasi publik (e- issn: 2797-0469), 4(04), 188-198. <https://doi.org/10.69957/praob.v4i04.1603>
- Zahlul, r. (2020). Analisis Implementasi Keterbukaan Informasi publik pada website uin ar-raniry banda aceh disusun. In journal geej (vol. 7, issue 2).